

DAFTAR PUSTAKA

- Almubaroq, M,R. (2022). Keterlambatan Penerbitan Sertifikat Ship Sanitation Melalui Aplikasi SINKARKES pada PT. Dian Ciptamas Agung. *Jurnal pendidikan*
- Badan Karantina Kesehatan. (2023). *Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Ship Sanitation melalui SINKARKES*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Departemen Perhubungan Laut. (2019). *Peraturan Menteri Perhubungan No. 65 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal*. Jakarta
- Enzelika, E., & Ginting, D. (2024). Optimalisasi Aplikasi SINKARKES dalam Pelayanan Kesehatan Pelabuhan di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 10(1), 45–53
- Herianto, M., & As'ari, H. (2022). *Karantina Kesehatan dan Pencegahan Penyakit di Wilayah Perbatasan*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Hadi, W., & Nugraha, M. (2018). *Pedoman Standard Operating Procedure (SOP) kapal asing: Penerbitan Maritim Nusantara*.
- International Health Regulations (IHR). (2005). *World Health Organization (WHO) Guidelines for Ship Sanitation Certification*. Geneva: WHO Press.
- Muhandis, F. (2023). Analisis Keterlambatan Penerbitan Dokumen Certificate Of Practique di PT. Andromeda Sentral Pasifik. *Jurnal pendidikan*
- Pambudi, H. (2018). Penerbitan dokumen publik melalui sistem digital. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*.
- Pazni, R, S. (2023). Analisis Keterlambatan Penerbitan Certificate Of Practique. *Jurnal pendidikan*
- Permenkes No. 356/Menkes/IV/2008. *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan*.
- Rasto. (2019). *Manajemen Prosedur dalam Operasional Pelayaran*. Jakarta: Mitra Maritim Press.
- Sari, Rosalia Indah, dkk. (2024). Peran Keagenan Kapal dalam Efisiensi Operasional Pelabuhan di Indonesia. *Jurnal Maritim dan Kepelabuhanan*, 8(1), 12–20.
- Sodiq, A. (2018). *Teknologi Informasi dan Dampaknya Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat*. Jakarta: Media Aksara.
- Suryani, D., & Hendrawan, A. (2020). *Manajemen Sanitasi Kapal dan Pencegahan Penyakit Menular*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. *Tentang Kekarantinaan Kesehatan*.